

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. (2008). *Menguak tabir hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Faisal, S. (2012). *Pengantar hukum bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hasbullah, F. H. (2005). *Hak-hak yang memberi jaminan*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Miru, A. (2007). *Kontrak dan perancangan kontrak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhtarom, M. (2014). *Asas-asas hukum perjanjian*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Natsir, M. (2020). *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putranto, G. (2014). *Kajian hukum terhadap akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Satrio, J. (2002). *Hukum jaminan: Hak jaminan kebendaan, hak tanggungan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (2014). *Wanprestasi menurut KUHPerdara: Doktrin dan yurisprudensi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Supramono, G. (1997). *Perbankan dan masalah kredit: Suatu tinjauan yuridis*. Jakarta: Djambatan.
- Supramono, G. (2012). *Perbankan dan masalah kredit*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syahmin, A. K. (2011). *Hukum kontrak internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, G. (2003). *Hukum perikatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

B. Jurnal

- Burhanuddin, F. (2021). Civil law and juridical aspects in the distribution of marriage joint property. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, 4(3). <https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2127>
- Mulyana, D. (2022). Peningkatan status hukum kesepakatan perdamaian oleh mediator menjadi akta perdamaian. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 8(1).
- Rosita, K., & Tanya, P. (2021). Kedudukan kreditur terhadap jaminan atas harta bersama yang belum dibagi akibat perceraian. *Acta Comitas*, 6(2).
- Sinaga, N. A. (2018). Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).
- Sinaga, R. Y. (2022). Dualisme makna akta pengakuan hutang. *Pattimura Legal Journal*, 1(3), 212–221. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7506>

C. Sumber Internet

- YouTube. (n.d.). *Video tentang hukum perjanjian/perdata*. Diakses pada 30 Maret 2026, dari <https://www.youtube.com/watch?v=1777V9Ouj>

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Putusan Pengadilan / Yurisprudensi

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1998). *Putusan Nomor 2691 PK/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998 tentang sengketa perdata (peninjauan kembali)*.
- Pengadilan Negeri Medan. (2022). *Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Mdn tentang perkara perdata gugatan (harta bersama/perjanjian)*.